

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY PT PELINDO IV (PERSERO)  
PADA ALOKASI BANTUAN PENDIDIKAN****IMPLEMENTATION OF PT PELINDO IV (PERSERO) CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY FUND MANAGEMENT POLICY ON ALLOCATION  
OF EDUCATIONAL ASSISTANCE****Ahmad Rosandi  
Sakir<sup>1</sup>**Universitas Pattimura,  
Indonesia<sup>1</sup>

email:

[ahmad.sakir@fisip.unpatti.ac.id](mailto:ahmad.sakir@fisip.unpatti.ac.id)**Arni<sup>2</sup>**STISIP 17-8-1945  
Makassar<sup>2</sup>

email:

[arnisamsir120@gmail.com](mailto:arnisamsir120@gmail.com)IJI Publication  
p-ISSN: 2774-1907  
e-ISSN: 2774-1915  
Vol.3, No.2, pp. 123-133  
Maret 2023Unit Publikasi Ilmiah  
Intelektual Madani  
Indonesia

**Abstrak:** Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini telah menjadi perilaku yang umum di Indonesia. Tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin besar, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi dan merupakan suatu lembaga internasional khusus dalam hal perumusan atau standar perumusan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dana CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada alokasi bantuan pendidikan dasar Sembilan tahun kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode kualitatif yang berarti bahwa penelitian dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan CSR di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang mengacu pada pelaksanaan Visi dan Misi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar. Adapun konsep yang disarankan dari hasil penelitian ini adalah cara/pola dan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dari dan kepada semua stakeholders yang diawali dari perencanaan, dengan memperhatikan manfaat serta perubahan, baik tingkat perubahan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan syarat keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, CSR Bantuan Pendidikan.**

**Abstract:** *Corporate Social Responsibility* (CSR) practices have become a common behavior in Indonesia. The demands on companies to run *Corporate Social Responsibility* (CSR) are getting bigger, so it does not rule out the possibility that *Corporate Social Responsibility* (CSR) can be a new obligation of business standards that must be met and is an international institution specialized in formulation or formulation standards. This research aims to describe and analyze the implementation of CSR fund management policies of PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) on the allocation of basic education assistance nine years makassar city. The method used in research is the quantitative method which means that research is done to understand the phenomena experienced by the research subject. The results showed that csr policy in PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar City Branch is in principle implemented in accordance with programs or activities that refer to the implementation of the Vision and Mission of PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar City Branch. The concept suggested from the results of this study is a comprehensive and participatory way / pattern and approach from and to all stakeholders that start from planning, taking into account the benefits and changes, both the level of short-term and long-term changes is a condition of successful implementation of CSR policies of PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar City Branch, especially in South Sulawesi.

**Keywords: Implementation, Policies, CSR Assistance Education.****PENDAHULUAN**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan

tersebut, kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini telah menjadi perilaku yang umum di Indonesia namun belum seluruh perusahaan menerapkannya. Tuntutan terhadap perusahaan untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin besar, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi kewajiban baru standar bisnis yang harus dipenuhi selayaknya standar ISO (*Internasional Organization for Standardization*) yang merupakan suatu lembaga internasional khusus dalam hal perumusan atau standar perumusan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan para stakeholder dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (Wahyudi dan Azheri, 2008:36). Johnson and Johnson (2006) dalam bukunya yang berjudul *Culture and Corporate Governance Social Responsibility* mendefinisikan "*Corporate Social Responsibility*" pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu perusahaan harus mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

Komponen utama *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah pengembangan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berpihak kepada kelompok miskin. Dunia bisnis dapat memberikan kontribusi penting dalam

menyediakan akses pendidikan berkualitas. Perusahaan juga dapat memberikan dampak yang kritis terhadap proses pemberdayaan melalui peningkatan standar pengembangan pendidikan dalam perusahaan. Dengan demikian, kemajuan dunia pendidikan memang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu ada kerja sama antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah, yang dikemas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Ditengah situasi masyarakat kota Makassar mutu pendidikan di kota Makassar menempati urutan ketiga di Sulawesi Selatan. Pemerintah mengeluhkan anggaran pembangunan ruang kelas yang menurutnya terbilang kecil dan layanan pendidikan yang tak memenuhi standar (<https://makassar.terkini.id/mutu-pondidikan-kota-Makassar-urutan-3-terendah-disulsel>). *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu wujud kepedulian PT. Pelindo IV (Persero) terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, pelindo IV sebagai perusahaan pengelola pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu menyisihkan dan perusahaan untuk anggaran CSR yang kebanyakan disalurkan untuk Program Kesejahteraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Hal ini mengindikasikan bahwa semua perusahaan pada hakikatnya diwajibkan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Setiap perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat berkaitan dengan pendidikan. Hal ini dilatar belakangi keluarnya peraturan daerah kota

Makassar No. 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perlu menetapkan peraturan Walikota tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah kota Makassar No. 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, setiap perusahaan yang beraktifitas di Daerah dan memiliki kinerja keuangan yang baik wajib melaksanakan program TSLP (pasal15). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan kajian terkait Bagaimana Implementasi Kebijakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada bantuan Pendidikan Dasar 9 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar. Adapun tujuan penelitian dari artikel ini adalah untuk menggambarkan cara/pola dan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dari dan kepada semua stakeholders yang diawali dari perencanaan, dengan memperhatikan manfaat serta perubahan, baik tingkat perubahan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan syarat keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Anggito & Setiawan, 2018) yaitu suatu penelitian dimana peneliti berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan fenomenatentangImplementasi Kebijakan Pengelolaan dana CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada Alokasi Bantuan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Makassar. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan setelah seminar proposal. Penelitian melakukan pengumpulan data primer berupa wawancara dan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan informan maupun melalui pengamatan langsung dan

melakukan kajian data sekunder berupa data fasilitas fisik, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dapat memperkuat hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2016) dalam penelitian ini adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan melalui observasi, dokumentasi, wawancara. Dalam wawancara, penulislebih banyak melakukan wawancara kepadakaryawan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar yang bertugas memberikan bantuan CSR, dankepalasekolahdikota Makassar yang mengajukanbantuandana CSR. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016) yang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data maka dengan selanjutnya tahap reduksi data yang diperoleh dari lapangan, tahap penarikan kesimpulan dan verivikasi data yang mendukung tahap pengumpulan data. Pengabsahan data yang terdiri dari triangulasi sumber yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN DISKUSI

Implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pelabuhan Indonesia IV (persero) pada alokasi bantuan pendidikan dasar Sembilan tahun di kota Makassar dapat dilihat dari beberapa aspek yang telah ditentukan pertama, isi kebijakan yang dapat dilihat dari (a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (b) jenis manfaat yang akan dihasilkan ; (c)perubahan yang diinginkan; (d) derajat kedudukan pembuat kebijakan; (e) siapa pelaksana kebijakan (f) sumber daya yang dihasilkan; dan kedua, lingkungan implementasi dapat dilihat dari aspek (a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor

yang terlibat; (b) karakteristik lembaga dan penguasa (c) keputusan dan daya tangkap.

### Isi Kebijakan

#### 1. Kepentingan yang Dipengaruhi

Implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan Kepentingan yang terpengaruh (interest affected) juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan melalui upaya koordinasi dalam rangka menggerakkan kelompok kepentingan terkait secara terorganisir khususnya masyarakat. Menggerakkan atau menstimulus partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan pembangunan, kreatif, mempunyai inisiatif, inovatif, berperan aktif memberikan input, berperan dalam formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program Bantuan CSR dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga hubungan yang sinergis antara pemerintah, pemerintah Kota Makassar dan masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dalam memecahkan berbagai persoalan dan mengarahkan kepentingan yang terpengaruh ke arah yang tepat juga merupakan salah satu teknik untuk mempengaruhi berbagai kepentingan agar dapat saling mendukung ke arah pencapaian tujuan pelaksanaan program

prioritas dalam rangka implementasi kebijakan CSR di Kota Makassar.

Komponen pertama yang menjadi hasil dari penelitian adalah kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan yang didapatkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dana CSR PT Pelabuhan Indonesia IV (persero) pada alokasi bantuan pendidikan dasar sembilan tahun di kota Makassar dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak Pelindo sebagai pihak pelaksana memiliki kepentingan dalam meningkatkan citra perusahaan dalam pelaksana kegiatan serta membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan khususnya di kota Makassar. Kemudian kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan dari pihak sekolah adalah adanya peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti, taman, perbaikan gedung sekolah, pembanguna ruang kelas dan bantuan berupa bangku dan meja belajar serta dana sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada setiap sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut.

Sedangkan hasil penelitian Lambelanova (2017) kepentingan/urusan dilakukan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta aktivitas koordinasi antar instansi pemerintah Kabupaten Bandung Barat, keterlibatan dan peran serta masyarakat sebagai stakeholders terbesar masih kurang, Selain itu karena banyaknya tarik menarik kepentingan atau urusan di tingkat elite pemerintah daerah sehingga belum mendapat dukungan sepenuhnya dari faktor kepentingan yang terpengaruh. Dan menurut Almuhammad Haris, dkk (2014) CSR (*Corporate Social Responsibility*) atas dasar memenuhi kewajiban kontraktual, dalam hal ini mematuhi peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Secara normatif, idealnya tanpa adanya protes dan kewajiban kontraktual, perusahaan seharusnya berusaha memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan.

## 2. Jenis Manfaat

Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya tarik citra perusahaan, meningkatkan kinerja dan efektivitas pada kegiatan. Jadi dengan adanya CSR akan dapat meningkatkan citra perusahaan karena pada setiap kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar akan dipublikasikan ke media sehingga akan banyak masyarakat yang akan mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah diadakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar. Dalam rangka meningkatkan manfaat dari program yang dilaksanakan bagi masyarakat Kota Makassar, diperlukan perencanaan partisipatif dalam rangka mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dalam implementasi kebijakan CSR Bidang Pendidikan di Kota Makassar.

Implementasi CSR yang dikategorikan sebagai modal sosial adalah ketika perusahaan mampu meyakinkan masyarakat bahwa dengan berdirinya perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, seperti: memberikan bantuan dana kepada masyarakat peduli lingkungan, memberikan bantuan modal, memberikan biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi dengan jalan adanya kesepakatan bersama antara pihak perusahaan maupun masyarakat sekitar perusahaan melalui dengan jalan melakukan kontrak sosial, sehingga implementasi CSR sebagai modal sosial dapat berjalan baik. Kadek Desy (2015).

Tahap pelaksanaan atau implementasi merupakan hal yang paling penting, sebagai tindakan nyata (riil) dilaksanakan sesuai rencananya. Pelaksanaan pemberian bantuan adalah secara langsung kepada siswa melalui institusinya dan secara tidak langsung. Besaran berapa jumlah pendanaan yang sudah harus disiapkan dalam anggaran tahunan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan program Bantuan Pendidikan berbagai wilayah yang ada

disekitar Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar, Perusahaan harus menjadikan sekolah sebagai partner atau mitra kerja, artinya sekolah itu aktif sebagai subyek dalam program atau tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh perusahaan saja tetapi berpartisipasi dalam program mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga ketika input program telah berubah menjadi output maka manfaat (outcome) lebih banyak diterima oleh masyarakat.

Sedangkan hasil penelitian Wandina (2016) bahwa bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar disekolah, dimana dalam pendidikan ruangan sangat diperlukan dan termasuk fasilitas yang penting.

## 3. Perubahan yang Diinginkan

Implementasi kebijakan CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Kota Makassar mempunyai tujuan strategis yaitu untuk Mensejahterakan anak Usia Dini. Derajat atau tingkat perubahan yang diharapkan (*event of change envisioned*) belum sepenuhnya tercapai, hal ini terkendala oleh kemampuan keuangan Perusahaan yang masih harus dibagi-bagi, seperti pada sektor pendidikan, anggaran tidak saja digunakan untuk pembangunan di sektor pendidikan tetapi juga digunakan untuk pembangunan di sektor lain, serta diperlukan proses atau kebiasaan/kegiatan yang memungkinkan anak-anak usia sekolah atau anggota keluarganya bersekolah tanpa mengganggu kehidupan perekonomian keluarga atau bahkan apabila memungkinkan orang tua anak usia sekolah tersebut mencari atau memiliki mata pencaharian yang tidak mengganggu anaknya bersekolah, dan hal ini memerlukan waktu atau proses yang tidak pendek sehingga untuk mencapai tingkat perubahan yang diinginkan harus melalui tahapan atau proses yang memakan waktu tidak pendek serta dalam kasus lain melalui tahapan atau proses yang harus disesuaikan

dengan program dan anggaran CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar.

Kebijakan yang mempunyai tujuan jangka panjang akan lebih sukar diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang diprioritaskan sebagai kegiatan yang mempunyai tujuan jangka pendek”, diantaranya yaitu meskipun PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi cukup mengandalkan empat bidang tersebut (Pelayanan Kapal, Pelayanan Barang, Penumpang dan Pelayanan Alat) harus pula meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder internal dan eksternal secara berkelanjutan.

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar merupakan Perusahaan sebagai penyalur bantuan mampu memberikan hasil positif seperti pemberian dana kegiatan kepada yang mampu memberikan bantuan dalam pengembangan minat dan bakat dari siswa. Sedangkan hasil penelitian Utama & Murfih (2017) bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan kelompok rentan, dengan fokus dibidang pendidikan.

#### 4. Derajat Kedudukan Pembuat Kebijakan

Apabila waktu atau usia dari suatu tata karyawan (*age of governance*) atau *age of decision making* tersebut masih baru maka implementasi suatu kebijakan dalam hal ini implementasi kebijakan perusahaan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena dalam penanganan atau penyelesaian suatu permasalahan yang berkembang di lapangan, oleh karena itu diperlukan kerja ekstra dari para pengambil kebijakan PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar.

Bahwa ketika PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar mengeluarkan produk-produk kebijakan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi publik atau melaksanakan urusan atau kewenangan perusahaan di bidang pendidikan, seharusnya mengutamakan fenomena-

fenomena permasalahan yang cukup krusial di masyarakat atau lebih mengedepankan/ memilih skala prioritas masalah-masalah mana yang lebih utama didahulukan untuk diselesaikan sehingga tidak berdampak lebih luas terhadap sektor atau bidang pembangunan lain dan meminimalisir terganggunya pelayanan atau fungsi-fungsi publik, mengingat bahwa seiring dengan era desentralisasi dengan titik berat pelaksanaan program CSR.

Sedangkan hasil penelitian Lambelanova (2017) bahwa kedudukan pembuat kebijakan yang merupakan aktor-aktor yang independen atau bebas untuk berinovasi kemudian melakukan kreatifitas dan keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan urusan yang telah ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelesaikan berbagai fenomena-fenomena permasalahan yang berkembang di masyarakat.

#### 5. Pelaksana Kebijakan

Tanggung jawab sosial (CSR) tidak hanya semata-mata bertanggung jawab bagi perusahaan itu sendiri, namun perusahaan diharapkan perlu memperhatikan masalah social. Program CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada sektor Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilihat dari tingkat pendidikan dan mutu pendidikan.

Merujuk tujuan tersebut, kegiatan CSR pendidikan meliputi peningkatan mutu pendidikan formal, beasiswa, dan bantuan untuk infrastruktur. Indikator pencapaian tujuan tersebut adalah mutu mengajar lebih baik, hasil Ujian Nasional meningkat, dan infrastruktur bertambah baik. Dengan demikian, tingkat efektifitas dana CSR untuk pendidikan dapat dilihat dari pencapaian Ujian Nasional, proses belajar mengajar, serta infrastruktur sekolah.

Sedangkan hasil penelitian Lambelanova (2017) bahwa dari segi kuantitas

maupun dari segi kualitas, pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus meningkatkan pemahaman yang mendalam bagi para implementor program yaitu dengan melakukan berbagai peningkatan kemampuan aparat baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat struktural.

#### 6. Sumber Daya yang Dihilangkan

Sumber-sumber yang terlibat dalam implementasi kebijakan meliputi orang-orang yang mempunyai kompetensi yang memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas (mampu mengatur secara efektif sumber daya yang telah dimiliki), akses terhadap informasi yang jelas, sarana dan prasarana yang tersedia serta kewenangan yang dimiliki.

Bahwa sumber-sumber daya yang ada sudah sepenuhnya menunjang implementasi kebijakan Program CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar. Khususnya dari segi sumberdaya manusia (SDM) yaitu karyawan yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya, anggaran yang terbatas, selain itu pun sarana dan prasarana sepenuhnya menunjang implementasi kebijakan program CSR di bidang pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Indah (2018) Dalam memperoleh dana tentunya ada proses penganggaran dana, proses penganggaran dana CSR pada PT. PLN Distribusi Bali Area Bali Utara dengan memfokuskan pada 7 aspek yang mana program-program yang telah dianggarkan dananya oleh Kantor Pusat PLN yang dimanajemen oleh divisi CSR dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) beserta dengan bendahara perusahaan. Anggaran dana untuk program CSR telah dianggarkan dan ditetapkan dari program-program tahun sebelumnya dengan melihat anggaran yang telah dikeluarkan. Selain dengan melihat anggaran dari tahun sebelumnya, anggaran yang diberikan ke PLN Pusat Unit Distribusi tersebut dilihat dari besar laba yang didapatkan dari setiap unit dan

nantinya laba tersebut akan dibagi setiap proporsi sehingga penyisihan itulah yang akan digunakan untuk CSR.

Sedangkan hasil penelitian Wahyuning Tyas (2019) sejalan dengan penelitian ini yang menyebutkan bahwa sumber daya yang memadai keberlangsungan perusahaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. fungsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berperan mengelola pengembangan komunitas, juga program pendidikan dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan.

### Lingkungan Implementasi

#### 1. Kekuasaan, Kepentingan Aktor yang Terlibat

Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para pelaku/aktor yang terlibat (*Power, interests and strategies of actor involved*) menghadapi berbagai kendala yang disebabkan karena keterbatasan kekuasaan, kewenangan, dana, dan lintas wilayah administrasi serta banyaknya perbedaan kepentingan dari aktor yang terlibat dan terdapatnya kelemahan dari berbagai strategi yang diterapkan oleh para pelaku kebijakan (*stakeholders*).

Pada penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa yang menjadi komponen dalam penelitian yang pertama adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dapat diketahui bahwa masing-masing aktor menjalankan tugas yang di berikan baik dari pihak sekolah maupun perusahaan ini dapat dilihat dari keberhasilan dari setiap kegiatan yang dibuat oleh sekolah melalui pemberian dana CSR dari perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Sopah et-al (2020) bahwa dalam kekuasaan, kepentingan & strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan, dalam indikator ini dapat dikatakan berhasil, kontrol dari implementator sudah berjalan dengan baik. Strategi yang dimiliki oleh implementator mengikuti kekuasaan yang

diberikan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang digunakan implementator sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan dari sebuah pelaksanaan kebijakan.

## 2. Karakteristik Lembaga Penguasa

Lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*) belum sepenuhnya didukung oleh karakteristik lembaga dan penguasa yang ideal, dimana penggunaan kewenangan dari karakter lembaga penguasa yang lebih lebih luas kewenangannya memakan waktu dan prosedur birokrasi yang cukup lama (PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar) sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut sudah optimal.

Implementasi kebijakan CSR khususnya pelaksanaan program bantuan bidang pendidikan dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing diantaranya adalah sekolah SD, SMP dan SMA, dimana pemberian bantuan dibidang pendidikan Kota Makassar tidak terlepas dari wilayah kepelabuhananan. Wilayah kepelabuhananan merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan Kemaritiman.

Bahwa pelaksana program dalam implementasi kebijakan CSR bidang Pendidikan di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar agar dapat menjalankan berbagai program atau kegiatan dengan baik dan sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah di tetapkan maka implementor program harus mempunyai kemampuan kompatibilitas yang tinggi, yaitu kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang datang dari sistem perusahaan tingkat atasnya artinya bahwa implementor program harus bisa mendapatkan dukungan dari Karyawan di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar di tingkat Pusat maupun Cabang, dan kemampuan mengakomodasikan

tuntutan dari subsistem perusahaan tingkat bawahnya artinya bahwa para implementor program dapat meneruskan atau mentransfer kebijakan yang harus dilaksanakan kepada organisasi perusahaan tingkat bawahnya dan dapat mengakomodir tuntutan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan rencana program yang akan dilaksanakan. Sedangkan hasil penelitian Rahmadanita et-all. (2018) bahwa dalam implementasi kebijakan smart government di Kota Bandung belum didukung oleh karakteristik lembaga dan penguasa yang ideal sehingga pelaksanaan kebijakaan tersebut masih menemui beberapa kendala. Salah satu kendalanya adalah belum ada struktur birokrasi yang jelas, dan kurang jelasnya peran dan fungsi pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam penerapan *smart governement*.

## 3. Kepatuhan dan Daya Tangkap

Dalam implementasi kebijakan CSR khususnya implementasi program prioritas bidang pendidikan, dalam rangka mencerdaskan anak usia dini. Perusahaan sudah bisa mengidentifikasi dan mengakomodir keinginan atau kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dibidang pendidikan.

Dapat diketahui bahwa Implementor program harus fokus terhadap pencapaian tugas dan mengesampingkan berbagai faktor internal atau kepentingan pribadinya ketika sedang melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan bisa lebih *all out* dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu implementor program harus mempunyai responsibilitas atau daya tanggap yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat sehingga keinginan atau kebutuhan masyarakat dapat dengan cepat terpenuhi serta dengan responsibilitas yang tinggi maka para implementor program bisa mendapatkan informasi dan data yang akurat dalam memenuhi keinginan atau kebutuhan masyarakat serta berguna bagi

evaluasi program yang telah dilaksanakan dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi input bagi proses pelaksanaan program yang akan datang.

Sedangkan hasil penelitian Suhada, et.all (2019) bahwa Kepatuhan dan daya tanggap oleh subjek kebijakan sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan ketidak patuhan masyarakat ketika sosialisasi tata batas kawasan, keikutsertaan dalam RHL serta ketidakpatuhan ketika dilakukan relokasi serta pencabutan tanaman RHL.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah terkait implementasi kebijakan pengelolaan dana CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada Alokasi Bantuan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan CSR di PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang mengacu pada pelaksanaan Visi dan Misi PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar. Kemudian hasil implementasi kebijakan CSR terdiri dari bidang pendidikan, Secara faktual sudah tepat sasaran di lapangan dan sudah efektif. Adapun konsep yang disarankan dari hasil penelitian ini adalah cara/pola dan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dari dan kepada semua *stakeholders* yang diawali dari perencanaan, dengan memperhatikan manfaat serta perubahan, baik tingkat perubahan jangka pendek maupun jangka panjang merupakan syarat keberhasilan implementasi kebijakan CSR PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kota Makassar khususnya di Sulawesi Selatan.

## REFERENSI

Almuhajir, H. dkk. (2014). Pengelolaan Corporate Social Responsibility PT. Losum di Kecamatan Ujung Leo

Kabupaten Bulukumba. Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas Vol. IV No.1 April 2014

Amin, W. (2008). Dasar dasar Customer Relationship. Jakarta Management. Harvarindo.

Crane, A. D. M. (2008). Corporat Social Responsibility: Readings and Cases In A Global. Jakarta: Sinar Grafika.

Dunn, W.N. (1999). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indah, N.T. dkk. Analisis proses penganggaran dan pengelolaan dana CSR serta dampaknya terhadap peningkatan citra perusahaan (Studi kasus PT. PLN) (Persero) Distribusi Bali Area Bali Utara, di Singaraja Buleleng). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesa, Vol:9 No. 2. Tahun 2018.

Jones, C. O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy, Wadsworth, inc, Belmont, California.

Johnson and Johnson, (2006). Culture and Corporate Governance Social Responsibility. Jakarta: Bumi Aksara.

Kadek, D.A. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai modal sosial pada PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi, Singaraja Bali. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) Vol. 5 No. 1 Tahun 2015

Kamsah. (2019). Mutu Pendidikan, Kota Makassar Urutan 3 Terendah Sulsel-Makassar Terkini. <https://makassar.terkini.id/mutu-pendidikan-kota-makassar-urutan-3-terendah-disulsel/>.

Lako, A. (2011). Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi. Jakarta: Erlangga.

Meutia, S. Pengaruh Kepemimpinan Saham Pemerintah dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Jurnal Ekonomi

- dan Informasi Akuntansi (Jenius) Vol. 2 No 2 Tahun 2010.
- Mursitama, dkk. (2010). Corporate Social Responsibility di Indonesia (Teori dan Implementasi) Institute for Development of Economic and Finance (INNDEF).
- Muharram, S. Kebijakan “Revolusi Hijau” Paman Birin dalam Menjaga Kerusakan Lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal JAKPP Vol. 6 No.1.Tahun 2019
- Nugroho, R. (2012). Public Policy. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, H. (2008). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: CV. Alfabeta.
- Rahmadanita. A. dkk. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government dalam Rangka Mewujudkan Smart City di Kota Bandung. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Vol. 44. No. 2.
- Rangkuti, F. (2009). Strategi promosi yang kreatif dan analisis kasus integrated marketing communication. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Makassar, Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Rossy.L.. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan & Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Sosihumaniora.Vol. 19. No.2. Tahun 2017.
- Sopah. F. dkk. (2017). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Vol. 2. No. 2 Tahun 2017.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhada. N. dkk. (2019). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau. Jurnal Media Konservasi. Vol. 24. No. 1.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan.
- Untung, B.H. (2008). Membedakan Konsep dan Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing.
- Utama, A. Murfhi. A. Analisis Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Vale Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan.Vol. 10. No. 2. Tahun 2017
- Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi. Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wandina, R. H. dkk. Implementasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Adaro Indonesia Bidang Pendidikan di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Jurnal Pendidikan Geografi.Vol. 3. No.6.Tahun 2016
- Wahyudi, S. A. (2008). Corporat Social Responsibility. Prinsip Pengaturan dan implementasi. Malang: In –Trans Publiching.
- Wahyuning Tyas. G. T.(2019). Implementasi Green School bagi Stakeholders Sebagai Program CSR Bidang Pendidikan pada PT. Pertamina Geothermal Energi Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Skripsi diPublikasikan. Universitas Lampung.



Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita.